

HINDU KAHARINGAN DAN KERUKUNAN MULTIKULTURAL DI KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

Oleh

Susi¹, Yoppie²

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
susiku1190@gmail.com, yoppiechoy@gmail.com

ABSTRACT

His paper examines the transformation of Hindu Kaharingan and its strategic role in fostering interreligious harmony within the multicultural society of Palangka Raya, Central Kalimantan. Hindu Kaharingan, originally the traditional belief system of the Dayak people, was formally integrated into Hinduism in the 1980s to gain administrative recognition, thereby creating a dual identity that blends local spirituality with formal religious structures.

Employing a systematic literature review and a theoretical-critical approach with interdisciplinary analysis, this study aims to synthesize findings on the function of Hindu Kaharingan as a socio-religious actor. The research demonstrates that infrastructures such as Balai Basarah and the institutional body Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) serve as key platforms for dialogue, cultural preservation, and social integration through rituals and interfaith collaboration.

Despite facing challenges such as politicization and shifts in the values of younger generations, the community exhibits resilience by revitalizing traditions and leveraging digital media. Consequently, this paper argues that Hindu Kaharingan occupies a strategic position in shaping inclusive social structures and makes a significant contribution to the discourse on local religions, identity politics, and cultural diversity in Indonesia.

ABSTAK

Tulisan ini mengkaji transformasi Hindu Kaharingan serta peran strategisnya dalam membangun kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat multikultural Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hindu Kaharingan, yang awalnya merupakan kepercayaan tradisional masyarakat Dayak, diintegrasikan secara formal ke dalam agama Hindu pada dekade 1980-an untuk memperoleh pengakuan administratif, yang melahirkan identitas ganda yang memadukan spiritualitas lokal dengan struktur agama formal. Menggunakan kajian literatur sistematis (systematic literature review) dan pendekatan teoritis-kritis dengan analisis interdisipliner, studi ini bertujuan mensintesis temuan mengenai fungsi Hindu Kaharingan sebagai aktor sosial-religius. Menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur seperti Balai Basarah dan lembaga Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) berfungsi sebagai platform utama dialog, pelestarian budaya, dan integrasi sosial melalui ritual serta kolaborasi lintas agama. Meskipun menghadapi tantangan seperti politisasi dan pergeseran nilai generasi muda, komunitas ini menunjukkan ketangguhan dengan merevitalisasi tradisi dan memanfaatkan media digital. Sehingga pada tulisan ini, bagi Hindu Kaharingan memiliki posisi strategis dalam membentuk struktur sosial yang inklusif dan memberikan kontribusi penting bagi diskursus agama lokal, politik identitas, dan keberagaman budaya di Indonesia

Keywords: Hindu Kaharingan, Kerukunan, Multikultural .

I. PENDAHULUAN

Kekayaan Indonesia dalam keragaman budaya dan agama menjadikan sebuah

negara ini memiliki kekhasan. Kekayaan dengan keberagaman menjadikan kondisi ini bagian integral membentuk

kerukunan antar umat beragama sebagai aspek krusial menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi salah satu cerminan nyata pluralitas tersebut. Di kota ini, berbagai agama besar hidup berdampingan secara damai, termasuk keberadaan agama lokal seperti Hindu Kaharingan yang memiliki akar mendalam dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Kaharingan pada mulanya merupakan sistem kepercayaan tradisional masyarakat Dayak yang tidak terlembagakan secara formal dalam struktur agama nasional. Namun demi memperoleh pengakuan administratif dari negara, sejak awal dekade 1980-an, Kaharingan diklasifikasikan sebagai bagian dari agama Hindu. Langkah ini merupakan bentuk strategi adaptasi terhadap kebijakan negara, yang dalam waktu bersamaan turut membentuk identitas baru bagi pemeluknya (Chalmers, 2009). Transformasi tersebut membuka peluang legal namun juga menimbulkan kompleksitas baru dalam konteks identitas dan keaslian tradisi kepercayaan lokal contohnya .

Perubahan status membuat orang-orang di dalamnya saling beda pendapat, terutama adanya anggapan campuran ajaran Hindu dan tradisi asli Kaharingan, sehingga tatkala secara internal masih terdapat penganut Kaharingan yang tidak ingin dikatakan sebagai Hindu Kaharingan, di satu sisi, hal ini memungkinkan komunitas Dayak memperoleh hak dan pengakuan negara dalam menjalankan ibadahnya. Namun di sisi lain, muncul ketegangan antara pelestarian budaya leluhur dan kebutuhan untuk beradaptasi secara institusional. Isu ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut keberlanjutan identitas budaya dan peran agama lokal dalam masyarakat modern. Pelestarian nilai-nilai tradisional dalam praktik keagamaan Kaharingan memainkan peran penting dalam

memperkuat identitas budaya dan menjembatani hubungan antarumat beragama. Seperti yang dijelaskan oleh Kreps (2010), ritual dan upacara adat Dayak tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga menjadi sarana membangun dialog dan toleransi antar kelompok agama. Interaksi ini berlangsung melalui kehidupan sehari-hari yang melibatkan kerja sama sosial di berbagai ranah, seperti kematian, pernikahan hingga kegiatan sosial lainnya.

Palangka Raya merupakan kota dengan komposisi keagamaan yang beragam. Keberadaan agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu (termasuk Kaharingan), dan Buddha hidup berdampingan dalam satu ruang kota. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga adat, dan tokoh-tokoh masyarakat turut berperan dalam memelihara komunikasi yang konstruktif antar umat. Dalam konteks ini, komunitas Hindu Kaharingan tidak hanya menjadi pelaku keagamaan, tetapi juga menjadi aktor sosial dalam membentuk tatanan yang inklusif.

Sejarah panjang pluralisme agama di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah lama terbiasa dengan interaksi lintas budaya dan kepercayaan. Tradisi lokal yang terbuka, serta fleksibilitas menjadi kekuatan yang mendukung kohesi sosial. Bahkan ketika terjadi masuknya agama-agama dari luar melalui kolonialisme dan urbanisasi, masyarakat Dayak tetap menjaga integritas sosial mereka melalui nilai-nilai adat dan sistem upacara yang inklusif (Faridatunnisa & Supriadi, 2022).

Hubungan antara umat Hindu Kaharingan dengan komunitas agama lain di Palangka Raya dibentuk dalam pola relasi yang terbuka. Kehidupan bersama, kerja sama antarwarga, dan kegiatan lintas agama seperti upacara dan lingkup sosial bersama menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar gagasan, tetapi benar-benar

terjadi dalam praktik sosial. Hal ini menjadi landasan penting untuk menganalisis hubungan sosial dan keagamaan serta memahami dinamika kerukunan di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Penguatan identitas agama yang bersifat eksklusif dapat mengganggu keseimbangan yang telah terbangun. Selain itu, politisasi agama dalam ranah lokal dapat menciptakan ketegangan yang merusak tatanan kerukunan. Perubahan gaya hidup generasi muda yang mulai menjauh dari praktik keagamaan tradisional juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan peran Hindu Kaharingan sebagai simbol perdamaian (Kreps, 2010). Padahal selama ini menjadi ruang utama untuk membangun solidaritas dan kohesi sosial antarumat beragama.

Kajian terhadap peran Hindu Kaharingan dalam membangun kerukunan umat beragama masih tergolong terbatas. Kebanyakan studi lebih menyoroti aspek budaya atau sejarahnya secara umum. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menyoroti peran aktif Hindu Kaharingan dalam struktur sosial masyarakat pluralistik di Kota Palangka Raya melalui pendekatan interdisipliner. Chalmers (2009) menyebut bahwa penggabungan Kaharingan ke dalam Hindu bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga bentuk perlawanan simbolik terhadap marginalisasi agama lokal. Strategi ini menguatkan posisi komunitas Dayak dalam sistem keagamaan nasional, namun tetap membuka ruang untuk mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari narasi nasional.

Penelitian oleh Setiawan dan Hadi (2021) mengungkap bahwa meskipun agama lokal sering kali termarginalkan dalam kebijakan publik, kekuatan budaya dan sistem pendidikan multikultural mampu mengangkat kembali peran mereka dalam

pembangunan sosial. Dalam konteks Kalimantan Tengah, hal ini menjadi strategi penting dalam memperkuat keberagaman yang inklusif.

Bennett dan Kreps (2010) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam konservasi budaya keagamaan dan pelestarian identitas melalui museum komunitas dan lembaga lokal. Strategi ini dapat memperkuat kerukunan dalam jangka panjang dengan menempatkan budaya lokal sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, tulisan ini penting disampaikan untuk memberi pemahaman yang lebih dalam terhadap posisi strategis Hindu Kaharingan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang damai. Kajian ini tidak hanya relevan dari segi akademik, tetapi juga berguna secara praktis dalam upaya pengembangan kebijakan kerukunan berbasis nilai-nilai lokal.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dinamika Hindu Kaharingan dalam membangun kerukunan umat beragama di Palangka Raya melalui pendekatan sosial dan religius. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi agama lokal dan pluralisme, serta manfaat praktis bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merumuskan strategi penguatan kerukunan lintas agama di daerah multikultural.

Metode

Metode dalam tulisan ini menggunakan kajian literatur sistematis atau *systematic literature review* yang berupaya mensintesis temuan-temuan akademik terdahulu mengenai peran Hindu Kaharingan agama leluhur Dayak yang diakui negara dalam konteks kerukunan multikultural di Kota Palangka Raya. Menggunakan pendekatan analisis konseptual terhadap data sekunder (jurnal, buku, dan laporan penelitian),

penelitian ini bertujuan memetakan dan menganalisis nilai-nilai ajaran Kaharingan (seperti Belom Bahadat) sebagai modal sosial yang mendukung kohesi dan toleransi antarumat beragama. Dengan merujuk pada kerangka teoritis Cooper (1988), tulisan ini mengidentifikasi posisi dan kontribusi spiritualitas Dayak dalam dinamika sosial perkotaan, menghasilkan proposisi teoretis tentang integrasi agama lokal dalam diskursus pluralisme Indonesia.

II. PEMBAHASAN

a. Strategi Adaptasi dalam Identitas Hindu Kaharingan

Kaharingan sebagai sistem kepercayaan tradisional masyarakat Dayak telah berkembang jauh sebelum kehadiran agama-agama besar di Nusantara. Kepercayaan ini tidak sekadar bersifat animistik, melainkan memiliki struktur kosmologi yang kompleks dan terorganisasi. Konsep ketuhanan dalam Kaharingan tercermin dalam keyakinan terhadap Ranying Hatalla Langit sebagai entitas tertinggi, yang menunjukkan adanya kesadaran monoteistik yang telah hidup dalam kosmos Dayak. Ini membuktikan bahwa Kaharingan bukan sekadar adat istiadat, tetapi merupakan agama yang hidup dan membentuk tatanan sosial serta spiritual masyarakat Dayak. Sistem kepercayaan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga ekologis dan etis, karena menyatukan hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur dalam satu kesatuan harmoni.

Keberadaan Kitab Panaturan yang disusun pada awal 1970-an menjadi bukti bahwa Kaharingan telah mengalami kodifikasi ajaran. Ini menandai pergeseran dari sistem lisan menuju tertulis, sebuah proses yang dalam studi agama menunjukkan transisi dari kepercayaan suku menuju agama masyarakat. Kitab ini menguraikan

ajaran moral, struktur kosmologi, serta tata cara ritus yang menjadi panduan hidup masyarakat Dayak khususnya penganut Kaharingan. Praktik-praktik ritual seperti *Tiwah*, *Manyanggar*, dan *Mamapas Lewu*, maupun upacara *Pakanan Sahur* yang mencerminkan bagaimana agama ini beroperasi secara holistik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen penguat identitas kolektif dan solidaritas sosial.

Tradisi ritual menurut Kaharingan merupakan contoh konkret bagaimana agama ini menghubungkan kehidupan manusia dan alam spiritual. Ritual-ritual tersebut menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan leluhur serta keterkaitan dengan siklus alam.

Dalam prosesnya, masyarakat terlibat secara kolektif melalui gotong royong, tari-tarian, dan persembahan hewan, yang semuanya merepresentasikan nilai-nilai kekeluargaan dan kohesi sosial. Dalam perspektif Durkheim, agama seperti ini tidak hanya memenuhi fungsi spiritual, tetapi juga menciptakan solidaritas mekanik dalam masyarakat yang homogen secara budaya.

Transformasi identitas Kaharingan terjadi ketika pada awal 1980-an, kepercayaan lokal ini diintegrasikan ke dalam Hindu sebagai upaya adaptasi terhadap kebijakan negara. Kebijakan pada masa Orde Baru yang hanya mengakui enam agama resmi mendesak penganut kepercayaan lokal untuk beradaptasi demi menjamin hak-hak sipil dasar, seperti pencatatan pernikahan, pendidikan agama, dan dokumen kependudukan.

Integrasi formal ini secara politis menguntungkan, namun secara teologis menimbulkan perdebatan, karena Kaharingan, yang berdiri sebagai sistem kepercayaan tersendiri, harus melebur ke

dalam struktur Hindu Dharma yang didominasi budaya dan teologi Bali. Namun disisi lain Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu terbukti berbuah manis bagi penganutnya, karena langkah adaptasi ini berhasil menyediakan kerangka formal agama negara yang sah, yang kemudian memfasilitasi pembentukan infrastruktur dan kelembagaan keagamaan yang diakui.

Walaupun satu sisi dapat mengubah keaslian tradisi, tetapi di sisi lain juga dapat berperan sebagai penguat dalam menjaga keberlangsungan sistem religi tersebut. Hingga saat ini, umat Hindu Kaharingan memiliki Balai Basarah dan Pura sebagai tempat ibadah, serta berafiliasi dengan organisasi payung Hindu nasional (seperti PHDI, KMHDI, dan WHDI), di samping tetap mempertahankan lembaga internal seperti Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK).

Fenomena ini mencerminkan strategi adaptasi ganda: mempertahankan kekhasan ritual Dayak sambil mengadopsi kerangka formal negara. Meskipun demikian, komunitas ini dihadapkan pada dilema baru pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (tahun 2017) mengenai status independen Kaharingan.

Pilihan untuk tetap memilih status Hindu masih dominan di kalangan penganut karena pertimbangan kemudahan administrasi yang sudah mapan dan trauma sejarah marginalisasi yang dialami sebelumnya

Situasi ini menciptakan ambiguitas identitas bagi penganutnya. Secara administratif mereka terdaftar sebagai umat Hindu, tetapi dalam praktik spiritual dan kultural, mereka tetap menjalankan ajaran asli Kaharingan. Ini memunculkan identitas ganda yang problematik antara memperkuat nilai

keaslian serta beradaptasi dengan identitas baru, di mana simbol-simbol Hindu digunakan dalam konteks formal, sedangkan nilai-nilai lokal tetap dipertahankan dalam praktik komunitas. Perubahan ini dapat dilihat sebagai bentuk “sinkretisme strategis,” yakni penggabungan elemen luar untuk mempertahankan sistem internal. Proses ini serupa dengan konsep "resistensi simbolik" yang diuraikan oleh James Scott James Scott dalam (Wijayanti, 2022) yakni bentuk perlawanan halus masyarakat terhadap struktur kekuasaan negara melalui adaptasi budaya yang disesuaikan.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena dalam struktur organisasi keagamaan Hindu di Indonesia, terutama melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), representasi dari Hindu Kaharingan masih sangat terbatas. Dalam banyak kasus, umat Kaharingan merasa kurang terwakili, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyusunan materi ajar agama. Hal ini memperlihatkan adanya subordinasi internal dalam institusi agama, yang seharusnya mampu mengakomodasi keragaman internal. Akibatnya, umat Kaharingan mengalami tekanan ganda untuk menyesuaikan diri tidak hanya dengan struktur keagamaan negara, tetapi juga dengan kultur dominan dalam komunitas Hindu nasional.

Meskipun demikian, umat Kaharingan terus menunjukkan resiliensi dalam mempertahankan tradisi. Mereka tetap melaksanakan ritual asli, bahkan dalam struktur Hindu yang formal. Di beberapa daerah, mereka juga mendirikan pura yang desain dan fungsinya berbeda dari pura Hindu Bali, menyesuaikan dengan filosofi lokal.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi asimilasi administratif, akar budaya lokal tetap menjadi dasar utama

spiritualitas umat Kaharingan. Strategi ini tidak hanya menjaga eksistensi Kaharingan, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam ruang sosial yang semakin plural dan kompleks.

Namun, dinamika ini tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan perubahan nilai-nilai sosial, terutama di kalangan generasi muda. Banyak anak muda Dayak yang lebih akrab dengan nilai-nilai universal modern daripada tradisi keagamaan lokal. Arus pendidikan nasional yang cenderung mengabaikan narasi lokal serta media massa yang mempromosikan budaya populer turut mendorong pergeseran ini. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan transmisi nilai dan ritual Kaharingan kepada generasi penerus jika tidak ada intervensi budaya yang tepat. Masalah ini menjadi semakin mendesak ketika negara secara resmi memberikan ruang bagi penganut kepercayaan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang mengakui aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

Kebijakan ini membuka kemungkinan bagi Kaharingan untuk tampil kembali sebagai entitas independen. Namun demikian, pilihan ini tidak serta-merta diambil semua komunitas, karena dalam praktiknya masih terdapat keraguan, baik karena keterbatasan infrastruktur keagamaan maupun karena trauma sejarah marginalisasi tadi.

Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Nali Eka (2022), menunjukkan bahwa umat Kaharingan kini berada dalam posisi tawar yang lebih baik, terutama karena meningkatnya kesadaran multikulturalisme dan keberagaman di Indonesia. Lembaga adat dan organisasi lokal telah memainkan peran penting dalam revitalisasi nilai-nilai tradisional. Selain itu, keterlibatan komunitas dalam pendidikan berbasis lokal dan

pelestarian budaya melalui museum komunitas juga menjadi strategi efektif dalam menjaga warisan kepercayaan Kaharingan.

Keseluruhan proses transformasi Hindu Kaharingan mencerminkan dinamika yang kompleks antara adaptasi terhadap struktur negara dan resistensi terhadap marginalisasi budaya. Di satu sisi, umat Kaharingan berhasil menggunakan kerangka hukum yang ada untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik. Di sisi lain, mereka tetap berjuang menjaga integritas spiritual dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai asli. Ini menjadikan Hindu Kaharingan sebagai contoh unik tentang bagaimana agama lokal mampu bertahan, beradaptasi, dan membentuk identitas baru dalam struktur keagamaan nasional yang seragam.

Melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan studi agama, antropologi, dan politik kebudayaan sebagai transformasi, ini bukan sekadar bentuk kompromi, tetapi juga representasi dari kemampuan komunitas lokal dalam mengelola identitas dan kekuasaan. Dalam konteks ini, Hindu Kaharingan tidak hanya sebagai entitas keagamaan, tetapi juga sebagai agen sosial yang secara aktif membentuk ulang struktur sosial dan budaya di tengah tekanan globalisasi dan homogenisasi identitas.

b. Peran Hindu Kaharingan dalam Kerukunan Umat di Palangka Raya.

Keberadaan umat Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya tidak hanya merepresentasikan entitas keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai aktor sosial-religius dalam masyarakat multikultural. Akar tradisi Dayak yang melekat kuat dalam ajaran dan ritual Hindu Kaharingan menjadikan agama ini tidak sekadar sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sistem

nilai sosial yang menyatukan komunitas. Dalam perspektif Fungsional Struktural, hal ini mencerminkan fungsi integratif dari institusi agama sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim, yaitu peran agama dalam menciptakan solidaritas sosial melalui kesamaan norma, nilai, dan praktik kolektif.

Peran ini tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, di mana tokoh agama Kaharingan tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat, pengambil keputusan komunitas, dan penghubung antar generasi. Dalam istilah Talcott Parsons, tokoh agama ini menjalankan fungsi *pattern maintenance* dan *integration* yakni mempertahankan pola budaya dan mengintegrasikan elemen sosial yang beragam ke dalam satu struktur sosial yang harmonis. Kehadiran mereka memberi ruang bagi penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan nilai kekerabatan yang mendalam, sebagaimana dicatat dalam studi Kreps (2010), yang menyebut bahwa agama lokal memiliki fungsi sosial kuat dalam struktur komunitas adat.

Salah satu manifestasi konkret dari peran sosial-religius Hindu Kaharingan adalah keberadaan Balai Basarah, yang dalam kerangka teori fungsional-struktural dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus: fungsi spiritual, edukatif, integratif, dan resolusi konflik. Bagunan Balai bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Hindu Kaharingan, tetapi juga ruang mediasi sosial, ruang dialog bagi umat dan antar umat beragama, serta pusat kehidupan kolektif masyarakat.

Keberadaannya menciptakan arena simbolik yang memperkuat hubungan antara simbolik dan kohesi sosial (Durkheim) di tengah keragaman agama.

Begitu juga kini dengan keberadaan Gedung Center Hindu Kaharingan menunjukkan dimensi adaptif sistem sosial Kaharingan terhadap tantangan zaman modern. Dengan menyediakan fasilitas pelatihan, dokumentasi sejarah, dan pendidikan generasi muda, lembaga ini menjalankan apa yang oleh Parsons disebut sebagai fungsi *latency* (pelestarian nilai) dan *adaptation* (penyesuaian terhadap lingkungan).

Transformasi ini memperlihatkan bagaimana struktur keagamaan lokal mampu mengembangkan dirinya dalam ranah kelembagaan dan teknologi tanpa kehilangan substansi nilai-nilai leluhur.

Secara kelembagaan, Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) menjalankan peran penting dalam mempertahankan kesinambungan sistem nilai dan relasi sosial. Dalam konteks teori Parsons, MB-AHK adalah sub-sistem dari sistem sosial yang menjalankan *goal attainment*, yakni mengarahkan komunitas pada tujuan-tujuan kolektif seperti kerukunan dan pelestarian identitas. Kegiatan seperti Safari Nyepi dan Festival Tandak menjadi bagian dari *mechanism of integration* (cara) yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana simbolik yang sarat makna dan memperkuat kesadaran kolektif lintas agama.

Seluruh aktivitas ini menunjukkan bahwa Hindu Kaharingan tidak hanya bertahan sebagai agama lokal, tetapi juga berfungsi sebagai komponen vital dalam struktur sosial pluralistik. Sejalan dengan prinsip fungsional-struktural, keberadaan institusi Hindu Kaharingan membantu menjaga stabilitas sosial dengan menyatukan berbagai elemen melalui sistem nilai dan norma bersama. Nilai-nilai adat seperti *belom bahadat*, *belom hapakat*, dan *belom penyang hinje simpei* menjalankan fungsi sebagai cara

memastikan bahwa keragaman tidak menjadi ancaman, tetapi menjadi sumber kekuatan yang memperkuat solidaritas sosial.

Meskipun demikian, seperti dicatat dalam teori fungsional-struktural, sistem sosial senantiasa menghadapi disfungsi dalam hal ini berupa tantangan seperti politisasi agama, segregasi urban, dan pengaruh konservatisme global. Namun sistem Hindu Kaharingan menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Parsons bahwa sistem sosial yang sehat mampu menyesuaikan diri tanpa mengorbankan stabilitas nilai-nilainya. Ini terbukti melalui strategi lokal berbasis kearifan praktis seperti gotong royong dan pendidikan lintas budaya yang memperkuat solidaritas antarumat.

Dari sisi generasi muda, keterlibatan mereka dalam pelestarian Hindu Kaharingan melalui media digital dan pendidikan adat mencerminkan fungsi penting dalam teori Talcott Parsons, yaitu *pattern transmission* (pewarisan pola nilai) dan *socialization* (proses sosialisasi). Artinya, nilai-nilai dan ajaran Hindu Kaharingan tidak hanya diajarkan melalui ritual tradisional seperti Tiwah atau kegiatan di Balai Basarah, tetapi juga disampaikan melalui cara-cara yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini.

Misalnya, ada konten edukatif tentang ajaran Hindu Kaharingan yang disebarluaskan melalui *YouTube*, *Instagram*, *TikTok*, hingga *podcast* lokal, yang menjelaskan sejarah, makna upacara, hingga filosofi hidup Dayak dalam format video singkat dan bahasa ringan. Ini membuat ajaran leluhur menjadi lebih mudah dipahami dan relevan bagi anak muda.

Dengan demikian, Hindu Kaharingan dalam kacamata fungsional struktural berfungsi sebagai sistem yang mengatur,

memelihara, dan menyesuaikan diri demi menjaga keteraturan dan integrasi masyarakat plural di kota Palangka Raya. Ia tidak hanya hadir sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai elemen sosial yang menjalankan berbagai fungsi penting dalam struktur masyarakat majemuk modern.

III. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya memiliki peran penting sebagai kekuatan sosial dan keagamaan yang menjaga keseimbangan antara tradisi Dayak dan sistem agama nasional. Perubahan dari kepercayaan lokal yang ada di Kalimantan tengah kini menjadi bagian dari Hindu, yang menunjukkan kemampuan umat Kaharingan beradaptasi tanpa meninggalkan nilai dan spiritualitas leluhur.

Dengan memfasilitasi pembentukan infrastruktur dan kelembagaan keagamaan yang diakui, dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai seperti *belum bahadat*, *belum hapakat*, dan *belum Penyang Hinje simpei* terus dijaga sebagai dasar kerukunan dan persatuan di masyarakat yang beragam. Sehingga keberadaan Hindu Kaharingan membuktikan bahwa agama lokal mampu menyesuaikan diri dan berperan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah kehidupan modern menunjukkan kemampuan adaptasi dan peran agama lokal dalam menjaga harmoni sosial. Karena itu, Hindu Kaharingan tidak hanya menjadi identitas keagamaan, tetapi juga contoh nyata dari perpaduan antara tradisi dan kehidupan modern yang memperkuat toleransi dan keberagaman di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, A., Sudarsana, I. M., & Kusuma, I. R. W. (2021, April). Varian

Identitas Hindu di Indonesia: Antara Multikulturalisme dan Bhinnêka Tunggal Ika. In Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (No. 2, pp. 32-42).

Anonim. (2017). Dokumen Integrasi Umat Kaharingan dengan Hindu Tahun 1980 dan Lain-lain. Palangka.

Bennett, D., & Kreps, C. (2010). Community participation and indigenous cultural heritage conservation in Kalimantan. ResearchGate.

Center Media. (2018). Peringatan integrasinya Agama Kaharingan dengan Agama Hindu. Retrieved from <https://palangkaraya.go.id/peringatan-integrasinya-agama-kaharingan-dengan-agama-hindu>

Chalmers, I. (2009). Intersecting Islamic and ethnic identities in Kalimantan, Indonesia. In *People, place and power* (pp. 92–112). Retrieved from <https://www.researchgate.net/profile/Dawn>

Cooper, H. M. (1988). Organizing knowledge synthesis: A taxonomy of literature reviews. *Knowledge in Society: The International Journal of Knowledge Transfer*, 1(1), 104-126.

Durkheim. Emile, *The Elementary Forms of the Religious Life* (New York: The Free Press, 1995).

Eka, N. (2022). Peran IAHN-TP Palangka Raya Dalam Melestarikan Identitas Kultural Penganut Hindu Kaharingan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 68–78. <https://doi.org/10.37329/jpah.v0i0.1617>.

Faridatunnisa, F., & Supriadi, S. (2022). Revitalisasi fungsi tempat ibadah adat sebagai ruang sosial dan dialog keagamaan di Kalimantan Tengah. *Al-Buhuts: Jurnal Penelitian Islam*, 18(2), 121–138. Retrieved from <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/albuhuts/article/view/6366>

Geertz, Clifford. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius.

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang. (2022). *Kurikulum Teologi dan Pendidikan Lokal: Tawur, Panaturan, Bahasa Sangiang* (Makalah kurikulum fakultas). Palangka Raya: IAHN-TP.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. Retrieved from <https://kemenag.go.id/file/dokumen/ModerasiBeragama.pdf>

Kreps, C. (2010). Museum-making and indigenous curation in Central Kalimantan, Indonesia. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/249427022>

Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. (2020). *Profil dan peran MB-AHK dalam masyarakat multikultural Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: MB-AHK Press.

Nuraini, E., & Hakim, M. (2020). Kearifan lokal dalam resolusi konflik keagamaan di komunitas multikultural. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 65–89. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/puslit/article/view/2807>

Ritzer. George & Douglas J. Goodman *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010).

Scarar, Hans. (2016). *Ngaju Religion the Conception of God Among A South Borneo People*. The Hague: Martinus Nijhoff. Diterjemahkan oleh Marko Mahin. Palangka Raya: Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.

Setiawan, H., & Hadi, S. (2021). Peran agama lokal dalam membangun toleransi: Studi atas agama Kaharingan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosial Budaya*, 18(1), 33–50.

Sugiyarto, Wakhid. (2016). “Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah”. *Jurnal Harmoni*. Vol 15

Susi, S. I. (2023). Eksistensi penganut Hindu Kaharingan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Palangka Raya. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 4(1). <https://doi.org/10.33363/swjsa.v4i1.646>

Wijayanti, T. C., & Mahsun, M. (2022). Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19: Studi Di Desa Jawisari Kabupaten Kendal. *Jurnal Politik Walisongo* Vol 4 No 1, 40-67.